TRIBUN PONTIANAK

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | (Nop) | Des | 2014 | Hal. : 20

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | (21) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Ketua Hakim Kasihani Lies

Sidang Tipikor MTQ Kalbar 2008

SINGKAWANG, TRIBUN - Terdakwa Tipikor MTQ Kalbar 2008 di Singkawang, Lies Indari mengatakan sejak adanya panitia kecil bentukan Kadisbudparpora kala itu, pengelolaan keuangan ke panitiaan di bidang kesenian dan rekreasi sepenuhnya dilakukan bendahara panitia kecil tersebut. Lies mengatakan, dirinya hanya menandatangani administrasi agar dana bisa cair.

"Saya hanya tanda tangani. Karena kata bendahara dana itu tak bisa cair jika tak ada tanda tangan saya," kata Lies Indari di persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (20/11).

Lies menegaskan, dirinya tidak pernah sama sekali melihat ataupun memegang uang kegiatan. "Saya sudah bilang, tak pernah di lewati uang. Semua kewenangan penggunaan uang ada di Kadis (Syech Bandar). Saya hanya tanda tangan," katanya.

Jawaban serupa disampaikannya saat Jaksa Adi Junaidi menanyakan pembelian baju. Pengunjung sidang bahkan sempat tertawa saat pertanyaan jaksa di jawab dengan jawaban serupa oleh Lies.

Saat jaksa Adi kembali bertanya mengenai Lies yang menerima uang dalam satu hari, ketua majelis hakim, Lie Sonny justru yang menjawab.

"Kan sudah disampaikan kalau dia (terdakwa) tanda tangan kuitansi supaya dana bisa cair," ungkap Lie. "Jadi tanda tangan saja," kata Adi yang dibenarkan oleh Lies.

Jaksa Adi Junaidi, bertanya dari mulai total anggaran di kepanitiaan yang diketuai Lies hingga pengelolaan uang. Sementara Jaksa Salomo Saing bertanya apakah tak dikroscek kuitansi yang ditandatangani.

"Begitu SK Kepala Dinas turun, semua kewenangan di Kadis. Jadi sudah bukan saya lagi," kata Lies.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Ike Florensi Soraya bertanya seputar uang yang dikelola bendahara bentukan dinas, pengajuan usulan dan langkah terkait dugaan adanya kuitansi dengan tanda tangan palsu. Ike juga bertanya mengenai ada tidaknya pemberian mandat ke bendahara bentukan dinas.

> "Kan sudah disampaikan kalau dia (terdakwa) tanda tangan kuitansi supaya dana bisa cair."
>
> **LIE SONNY**
> Ketua Majelis Hakim

Lies menjelaskan satu persatu dengan lancar. Mulai dari pengajuan dana, tak diberikannya berkas perkara oleh jaksa hingga keheranannya mengenai pengajuan pencairan dana yang dinyatakan hilang.

"Pencairan pasti melalui pengajuan. Kan berkas pengajuan melekat dengan laporan pertanggung jawaban, tapi kok bisa hilang," katanya.

Selain jaksa dan penasihat hukum, Hakim Yamto Susena dan Ilyas Silalahi juga turut menyampaikan pertanyaan. Terakhir, Ketua Majelis Hakim, Lie Sonny menyampaikan pesan ke terdakwa.

Lie mengatakan seseorang memang harus patuhi atasan. Namun mengikuti atasan haruslah pada hal-hal yang wajar.

"Saudara ada ambil uang ini?, sedikitpun tidak ada?," tanya Sonny yang dijawab Lies tak ada sama sekali. "Masalahnya tanda tangan ini," lanjut Sonny.

Ketua majelis hakim mengingatkan, saat situasi seseorang seperti terdakwa saat ini tak ada orang yang lihat kita. Sonny mengatakan, paling orang hanya akan berkata kasihan. **(dum)**

Hak Penari

SEBELUM memasuki agenda pemeriksaan terdakwa, sidang kemarin juga mengagendakan keterangan saksi ahli. Kali ini, Dekan Fakultas Hukum Untan yang juga Ahli Hukum Pidana, Dr Syarif Hasim SH Mhum dihadirkan pihak terdakwa.

Dalam kesempatan itu, Hasim menjelaskan panjang lebar mengenai perbuatan yang masuk kategori pidana. Dirinya juga menjelaskan mengenai kerugian negara dan lembaga yang memiliki kewenangan menetapkan kerugian negara hanyalah BPK.

"Kerugian negara nyata dan pasti jumlahnya. Itu terjadi akibat perbuatan melawan hukum. BPK bersifat mandiri, diakui negara dan independen sehingga tak memihak," paparnya.

BPK menurutnya tak ada pendelegasian ke lembaga lain untuk melakukan audit dan menetapkan angka kerugian. Penghitungan kerugian negara, harus patuhi standar penghitungan BPK.

Terkait dana transportasi penari yang diefisien-sikan lalu digunakan untuk membeli keperluan lain, saksi ahli menegaskan bahwa uang itu bukanlah uang negara. Uang itu, menurutnya merupakan uang penari.

"Itu uang penari. Hak penari untuk menuntut kekurangannya," kata dia. **(dum)**

Sub Bagian Hukum dan Humas
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat